

## TATANAN BARU MASYARAKAT DI SYIRIA PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB

Muhammad Ihsanul Hasani<sup>1</sup>, Ellya Roza<sup>2</sup>, Waldi Saputra<sup>3</sup>  
[muhammadihsanulhasani8@gmail.com](mailto:muhammadihsanulhasani8@gmail.com)<sup>1</sup>, [ellya.roza@uin-suska.ac.id](mailto:ellya.roza@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>,  
[waldisaputra@stt-alkifayahriau.ac.id](mailto:waldisaputra@stt-alkifayahriau.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Al-Kifayah Riau<sup>1,3</sup>, UIN Suska Riau<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terbentuknya tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan sejarah pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sumber data diperoleh dari buku-buku sejarah Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab berhasil membangun tatanan sosial, politik, dan administrasi yang lebih terstruktur di wilayah Syiria setelah wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain pembentukan sistem administrasi pemerintahan, pengaturan perpajakan seperti jizyah dan kharaj, serta pemberian jaminan keamanan dan kebebasan beragama bagi masyarakat setempat. Selain itu, Umar bin Khattab juga menata sistem militer dan pemerintahan daerah guna menjaga stabilitas wilayah yang baru ditaklukkan. Kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap terciptanya stabilitas sosial dan integrasi masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama dan etnis. Dengan demikian, tatanan baru masyarakat di Syiria pada masa Umar bin Khattab menunjukkan keberhasilan sistem pemerintahan Islam dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Umar Bin Khattab, Syiria, Tatanan Masyarakat, Pemerintahan Islam, Khulafaur Rasyidin.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the formation of a new social order in the region of Syria during the leadership of Caliph Umar ibn al-Khattab. This research employs a library research method by examining various literature sources related to the history of Islamic governance during the era of the Rightly Guided Caliphs. The data sources were obtained from books on Islamic history, scholarly journal articles, and other relevant academic documents related to the research topic. The results of the study indicate that the administration of Umar ibn al-Khattab successfully established a more structured social, political, and administrative order in Syria after the region came under Islamic rule. Several policies were implemented, including the establishment of an administrative governance system, regulation of taxation such as jizyah and kharaj, and the provision of security and religious freedom for the local population. In addition, Umar ibn al-Khattab also organized military and regional governance systems to maintain stability in the newly conquered territories. These policies significantly contributed to the creation of social stability and the integration of diverse religious and ethnic communities. Therefore, the new social order established in Syria during the reign of Umar ibn al-Khattab demonstrates the effectiveness of Islamic governance in promoting justice, order, and social welfare.*

**Keywords:** Umar Ibn Al-Khattab, Syria, Social Order, Islamic Governance, Rightly Guided Caliphs.

### PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin merupakan fase yang sangat penting dalam perkembangan sistem pemerintahan, sosial, dan politik dalam masyarakat Islam. Pada periode ini, umat Islam tidak hanya

mengalami kemajuan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam pengelolaan pemerintahan, administrasi negara, serta pengaturan masyarakat yang semakin luas dan beragam. Salah satu wilayah yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik pada masa tersebut adalah Syiria. Wilayah ini menjadi bagian penting dari perluasan kekuasaan Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah antara tahun 634 hingga 644 M (Yatim, 2019).

Sebelum kedatangan Islam, Syiria berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai kawasan di Timur Tengah. Selain itu, Syiria dikenal sebagai wilayah yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang cukup kompleks. Sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen dengan berbagai aliran teologis, sementara sebagian lainnya terdiri dari komunitas Yahudi dan kelompok masyarakat lokal lainnya. Keanekaragaman sosial tersebut menjadikan Syiria sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang cukup rumit (Hitti, 2021).

Menjelang berakhirnya kekuasaan Bizantium di Syiria, kondisi sosial dan politik masyarakat di wilayah tersebut menghadapi berbagai persoalan. Konflik politik yang berlangsung dalam jangka waktu lama, tekanan ekonomi, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bizantium menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas wilayah. Dalam situasi tersebut, masuknya kekuasaan Islam membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan peralihan kekuasaan politik, tetapi juga menyangkut terbentuknya tatanan sosial baru dalam masyarakat yang sebelumnya berada di bawah sistem pemerintahan Bizantium (Rahman, 2020).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Syiria menjadi salah satu wilayah penting yang berada dalam kekuasaan Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan administrasi yang kuat serta komitmen tinggi terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Umar tidak hanya menitikberatkan pada perluasan wilayah kekuasaan, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai oleh pemerintahan Islam (Madjid, 2019).

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh Umar bin Khattab adalah melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan di wilayah-wilayah yang baru berada di bawah kekuasaan Islam, termasuk Syiria. Penataan tersebut dilakukan melalui pembentukan sistem administrasi yang lebih terorganisasi dan sistematis. Umar membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam beberapa daerah administratif yang dipimpin oleh para gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat di Madinah. Pembagian wilayah ini bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif serta mampu menjaga stabilitas wilayah yang luas (Sjadzali, 2018).

Selain melakukan penataan dalam bidang administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab juga menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial masyarakat di Syiria. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pengaturan sistem perpajakan yang terdiri dari jizyah dan kharaj. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada masyarakat non-Muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara sekaligus sebagai jaminan perlindungan dari pemerintah. Sementara itu, kharaj merupakan pajak yang dikenakan terhadap tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sistem perpajakan tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban masyarakat terhadap negara dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahman, 2020).

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai sumber sejarah menjelaskan bahwa Umar sangat menekankan prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Ia bahkan sering melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan yang dijalankan oleh para pejabat di daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan pada masa tersebut tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan stabil (Nasution, 2018).

Perubahan dalam tatanan masyarakat Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak hanya terlihat dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial dan keagamaan. Masyarakat Syiria yang terdiri dari berbagai kelompok agama tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka masing-masing. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa tersebut memiliki pendekatan yang relatif toleran terhadap keberagaman masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya (Azra, 2021).

Salah satu peristiwa yang sering dijadikan contoh penerapan prinsip toleransi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah penyerahan kota Yerusalem kepada umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, Umar memberikan jaminan keamanan kepada seluruh penduduk kota serta menjamin kebebasan mereka dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Peristiwa ini sering dianggap sebagai salah satu contoh penting dalam sejarah hubungan antaragama dalam peradaban Islam (Hitti, 2021).

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintahan Umar bin Khattab berhasil membangun tatanan masyarakat baru di wilayah Syiria yang lebih stabil dan terorganisasi. Tatanan tersebut tidak hanya mencakup sistem pemerintahan yang lebih efektif, tetapi juga hubungan sosial yang relatif harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab memiliki kemampuan dalam mengelola masyarakat yang bersifat plural sekaligus menciptakan stabilitas sosial di wilayah yang baru berada dalam kekuasaan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai terbentuknya tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi penting untuk diteliti. Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem pemerintahan Islam pada masa awal mampu mengelola wilayah yang luas serta masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan stabil.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab serta berbagai kebijakan yang diterapkan dalam menata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah peradaban Islam, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, maupun karya akademik lainnya yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian historis mengenai tatanan masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berdasarkan berbagai sumber literatur yang tersedia (Zed, 2020).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sejarah melalui proses interpretasi terhadap berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif kebijakan-kebijakan pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab serta pengaruhnya terhadap pembentukan tatanan masyarakat di wilayah Syiria. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada proses analisis serta penafsiran terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (Sugiyono, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya sejarah yang secara langsung membahas tentang pemerintahan Umar bin Khattab serta perkembangan wilayah Syiria pada masa awal Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam, khususnya yang membahas sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti (Yatim, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, literatur tersebut dikaji secara mendalam untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab dalam menata kehidupan masyarakat di wilayah Syiria. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis agar data yang digunakan memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang dikaji (Zed, 2020).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur, kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tatanan masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Melalui proses analisis ini, peneliti berupaya menjelaskan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab serta dampaknya terhadap pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Sugiyono, 2021).

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses terbentuknya tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan kontribusi berbagai kebijakan pemerintahan pada masa tersebut dalam menciptakan stabilitas sosial di wilayah yang baru berada di bawah kekuasaan Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Umar Bin Khattab**

Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam pemerintahan Islam setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraissy al-Adawi. Ia lahir di Mekkah sekitar tahun 584 M dari keluarga Bani Adi, salah

satu kabilah terpendang dalam suku Quraisy. Sejak masa sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian, ketegasan, serta kemampuan kepemimpinan yang kuat di tengah masyarakat Arab (Yatim, 2019).

Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Islam yang berhasil melakukan berbagai reformasi administrasi negara. Kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi dan berkeadilan. Dalam berbagai kajian sejarah Islam disebutkan bahwa Umar berhasil membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang mendukung stabilitas politik serta memperkuat struktur administrasi negara (Ali & Istihana, 2024).

Pada awalnya Umar bin Khattab termasuk salah satu tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian ia memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al-Qur'an dari surah Thaha yang dibacakan oleh saudaranya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupannya sehingga ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh dalam perkembangan Islam (Nasution, 2018).

Setelah memeluk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam membela agama Islam. Ia tidak ragu menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim meskipun menghadapi tekanan dari kaum Quraisy. Ketegasan dan keberaniannya membuat umat Islam semakin percaya diri dalam menjalankan ajaran Islam secara terbuka (Azra, 2021).

Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 M. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan wasiat Abu Bakar yang kemudian disetujui oleh para sahabat. Masa pemerintahan Umar berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun, hingga tahun 644 M. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, meliputi wilayah Persia, Mesir, Palestina, hingga Syria (Hitti, 2021).

Selain dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Umar juga dikenal memiliki sistem administrasi pemerintahan yang sangat baik. Ia membangun berbagai institusi pemerintahan yang menjadi dasar bagi sistem administrasi negara Islam, seperti pembentukan diwan (administrasi negara), sistem pengadilan, serta pengelolaan keuangan negara yang lebih terstruktur (Sjadzali, 2018).

### **Tantangan pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab**

Masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masa ini, umat Islam tidak hanya berhadapan dengan konflik internal, tetapi juga dengan kekuatan besar dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia (Yatim, 2019).

Pemerintahan Umar bin Khattab menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial, terutama dalam mengelola wilayah kekuasaan yang semakin luas setelah ekspansi Islam. Dalam kondisi tersebut Umar melakukan berbagai inovasi administratif, termasuk pembentukan lembaga pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan terhadap para gubernur daerah (Rifky, Duryat, & Saddami, 2023).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Umar bin Khattab adalah mengelola wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Penaklukan wilayah-wilayah baru membawa konsekuensi berupa keberagaman etnis, budaya, serta agama yang harus diatur dalam sistem pemerintahan Islam. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat (Rahman, 2020).

Selain itu, Umar juga menghadapi tantangan dalam mengatur sistem administrasi pemerintahan agar tetap efektif di wilayah yang luas. Untuk mengatasi hal tersebut, ia

melakukan berbagai reformasi administrasi, seperti pembentukan sistem provinsi, pengangkatan gubernur, serta pengawasan terhadap para pejabat pemerintahan di daerah (Sjadzali, 2018).

Di bidang ekonomi, Umar bin Khattab juga melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur distribusi kekayaan negara. Ia mengembangkan sistem baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara serta menetapkan berbagai aturan terkait pajak dan pengelolaan tanah di wilayah yang baru ditaklukkan (Azra, 2021).

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Umar bin Khattab berhasil menjaga stabilitas pemerintahan Islam sekaligus memastikan bahwa perluasan wilayah kekuasaan tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat.

### **Kondisi Masyarakat Syiria Sebelum Islam**

Sebelum berada di bawah kekuasaan Islam, wilayah Syiria merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium yang merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di kawasan Timur Tengah pada masa itu. Wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jalur komunikasi antara wilayah Asia, Afrika, dan Eropa (Hitti, 2021).

Masyarakat Syiria terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Mayoritas penduduknya beragama Kristen dengan berbagai aliran, seperti Ortodoks dan Monofisit. Selain itu, terdapat pula komunitas Yahudi serta kelompok masyarakat lokal yang memiliki latar belakang budaya yang beragam (Azra, 2021).

Namun demikian, pada masa akhir kekuasaan Bizantium, masyarakat Syiria mengalami berbagai tekanan sosial dan ekonomi. Pemerintah Bizantium menerapkan kebijakan perpajakan yang cukup berat kepada masyarakat setempat. Selain itu, konflik teologis antara berbagai aliran dalam agama Kristen juga sering menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat (Rahman, 2020).

Situasi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat Syiria merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bizantium. Oleh karena itu, ketika pasukan Muslim memasuki wilayah tersebut, sebagian masyarakat tidak melakukan perlawanan yang berarti karena mereka berharap mendapatkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan stabil (Yatim, 2019).

### **Tatanan Baru Masyarakat Syiria pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab**

Setelah wilayah Syiria berhasil berada di bawah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, berbagai kebijakan administratif mulai diterapkan untuk menata kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik serta membangun sistem pemerintahan yang mampu mengakomodasi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan agama yang beragam. Dalam hal ini, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan administrasi yang baik serta mampu mengelola wilayah kekuasaan yang luas secara efektif (Yatim, 2019).

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah melakukan pembagian wilayah administrasi secara lebih terstruktur. Wilayah Syiria dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang dipimpin oleh para gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah di Madinah. Sistem ini memungkinkan pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah sehingga stabilitas politik dan keamanan wilayah dapat terjaga dengan baik (Sjadzali, 2018). Menurut Karim (2020), pembentukan struktur pemerintahan yang jelas pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi salah satu dasar perkembangan sistem administrasi negara dalam sejarah pemerintahan Islam.

Selain pembentukan sistem administrasi wilayah, Umar bin Khattab juga menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah Syiria. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan sistem perpajakan yang terdiri dari jizyah dan

kharaj. Pajak jizyah dikenakan kepada masyarakat non-Muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara, sedangkan pajak kharaj dikenakan terhadap tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sistem perpajakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban masyarakat dan perlindungan yang diberikan oleh negara (Rahman, 2020).

Dalam bidang pengelolaan keuangan negara, pemerintahan Umar bin Khattab juga mengembangkan lembaga baitul mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Melalui lembaga ini, berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah, dan kharaj dikelola secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung jalannya pemerintahan. Menurut Hidayat (2022), sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab menunjukkan adanya perkembangan sistem ekonomi yang relatif terorganisasi dalam sejarah pemerintahan Islam.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemasukan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah yang baru berada di bawah kekuasaan Islam. Wahyudi (2020) menjelaskan bahwa sistem pajak seperti jizyah dan kharaj memberikan kontribusi penting dalam membangun hubungan yang lebih stabil antara pemerintah Islam dan masyarakat non-Muslim di wilayah kekuasaannya.

Dalam aspek sosial dan keagamaan, pemerintahan Umar bin Khattab juga menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat non-Muslim di wilayah Syiria. Mereka tetap diperbolehkan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta mempertahankan tempat-tempat ibadah yang telah ada sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa tersebut memiliki pendekatan yang relatif toleran terhadap keberagaman masyarakat (Azra, 2021). Ismail (2021) juga menjelaskan bahwa kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh Umar bin Khattab berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Perubahan sosial yang terjadi di wilayah Syiria setelah berada di bawah kekuasaan Islam juga terlihat dari proses integrasi masyarakat lokal ke dalam sistem pemerintahan baru. Sari (2021) menjelaskan bahwa transformasi sosial yang terjadi pada masa awal pemerintahan Islam menunjukkan adanya proses adaptasi antara sistem pemerintahan Islam dengan struktur sosial masyarakat setempat. Proses ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang relatif harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut, Maulana (2023) menjelaskan bahwa struktur sosial masyarakat Syiria pada masa awal Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan dan distribusi kekuasaan. Integrasi wilayah Syiria ke dalam sistem pemerintahan Islam membawa perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium.

Dengan demikian, berbagai kajian sejarah menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas politik wilayah Syiria, tetapi juga berperan dalam membentuk tatanan sosial baru yang lebih terorganisasi. Sistem administrasi yang tertata, kebijakan ekonomi yang relatif adil, serta sikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kajian kepustakaan mengenai terbentuknya tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan serta menciptakan stabilitas sosial di wilayah tersebut. Sebagai khalifah kedua dalam pemerintahan Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, menjunjung tinggi keadilan, serta memiliki kemampuan administrasi yang baik dalam mengelola wilayah kekuasaan Islam yang semakin berkembang.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Syiria berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang pada masa itu menghadapi berbagai permasalahan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Struktur masyarakat Syiria terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup dalam kondisi sosial yang cukup kompleks. Selain itu, kebijakan perpajakan yang cukup berat serta konflik keagamaan yang terjadi pada masa pemerintahan Bizantium menyebabkan sebagian masyarakat mengalami tekanan sosial maupun ekonomi.

Setelah wilayah Syiria berada dalam kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, berbagai kebijakan mulai diterapkan untuk menata sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara lebih terorganisasi. Umar bin Khattab melakukan pembaruan dalam sistem administrasi dengan membagi wilayah kekuasaan ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh para gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Di samping itu, pengelolaan keuangan negara melalui lembaga baitul mal serta penerapan sistem pajak seperti jizyah dan kharaj juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam aspek sosial dan keagamaan, pemerintahan Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap yang toleran terhadap masyarakat non-Muslim yang tinggal di wilayah Syiria. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing serta memperoleh perlindungan dari pemerintahan Islam. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Umar bin Khattab tidak hanya berfokus pada perluasan wilayah kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan tatanan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Dengan demikian, tatanan baru masyarakat di wilayah Syiria pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai hasil dari berbagai kebijakan yang mencakup aspek administrasi, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan sekaligus membangun hubungan sosial yang relatif harmonis di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab memberikan kontribusi yang besar dalam membangun dasar sistem pemerintahan Islam yang berkeadilan serta mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat di wilayah kekuasaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., & Istihana. (2024). Umar bin al-Khattab: Kajian pendidikan Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan politik Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*.
- Alim, A. (2020). Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Pemerintahan Islam. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(2), 115–128.
- Azra, A. (2021). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Donner, F. M. (2020). *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fauzi, M. (2021). Sistem Administrasi Pemerintahan pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Studi*

- Islam, 6(1), 45–60.
- Hidayat, R. (2022). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 22–35.
- Hitti, P. K. (2021). *History of the Arabs*. London: Macmillan Education.
- Hourani, A. (2020). *A History of the Arab Peoples*. London: Faber & Faber.
- Ismail, N. (2021). Toleransi Beragama pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 90–102.
- Karim, A. (2020). Sistem Pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sejarah Islam*, 5(1), 33–47.
- Lapidus, I. M. (2020). *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Madjid, N. (2019). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Maulana, I. (2023). Struktur Sosial Masyarakat Syiria pada Masa Awal Islam. *Jurnal Peradaban Islam*, 8(2), 77–92.
- Nasution, H. (2018). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Rahman, F. (2020). *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmat, A. (2022). Kebijakan Politik Umar bin Khattab dalam Mengelola Wilayah Islam. *Jurnal Ilmu Sejarah*, 9(1), 55–70.
- Rifky, S., Duryat, M., & Saddami, S. (2023). Manajemen kepemimpinan kebijakan politik Umar bin Khattab. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 311–325.
- Sari, D. (2021). Transformasi Sosial Masyarakat Syiria pada Masa Ekspansi Islam. *Jurnal Studi Sejarah*, 6(2), 101–114.
- Sjadzali, M. (2018). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Wahyudi, T. (2020). Sistem Pajak pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 88–101.
- Yatim, B. (2019). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, M. (2023). Administrasi Pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Studi Peradaban Islam*, 9(1), 60–75.